

Dari Rumah Gadang ke Ruang Sidang: Tentang Politik Urang Minang

Oleh: Mutia Jummidayani Putri

Tulisan ini berawal dari tugas mata kuliah jurnalistik spesialisasi. Pagi itu rasanya cuaca baik-baik saja, tidak begitu panas, tidak juga mendung. Tetapi, hasil undian penentuan tema tulisan untuk nilai ujian tengah semester (UTS) terdengar seperti petir di siang bolong di telingaku. Iya, aku mendapat tema yang paling tidak aku inginkan, yakni soal politik lokal. Padahal aku sudah mengatakan amit-amit dapat tema politik, ternyata kalau sudah jodoh memang tak dapat dihindari. Entah apa yang akan kuceritakan nanti kepada kalian tentang politik ini, minat saja tak punya, apalagi pengetahuan soal politik. Kurang lebih begitu isi pikiranku kala itu. Satu-satunya hal yang aku tahu soal Minangkabau hanyalah hal identik yang melekat pada diri mereka, yakni Islam, merantau, dan *manggaleh* atau berjualan. Bahkan aku sempat melihat ada yang mengatakan, “*di ma bumi dipijak, di sinan awak manggaleh*”.

Tapi, pasrah akan nasib bukanlah sesuatu yang ada di kamus hidupku. Untungnya saat itu juga, dosenku menyarankan untuk mewawancarai salah seorang dosen ilmu komunikasi lain, yang kebetulan tesisnya membahas soal politik lokal. Mendengar hal itu, hatiku girang bukan kepalang, seperti monyet yang menemukan pohon pisang di tengah hutan jati. Langsung saja, lusa harinya diriku melaju menuju tempat dosen yang menjadi narasumberku.

Ketika sampai di tempat tujuan, sang dosen ternyata sedang melakukan bimbingan skripsi dengan mahasiswa bimbingannya. Sembari menunggu, aku melihat ke arah sekumpulan *ojek online* yang tengah *live streaming* di salah satu aplikasi media sosial—Tiktok, ternyata fenomena semacam ini sedang ramai dilakukan. “Ayo tap-tap layarnya kak. Iyak, kakak Ayu. Terimakasih banyak kakak Ayu.” Begitu teriak mereka bersamaan. Ternyata mereka berterimakasih karena seorang wanita yang mereka panggil kakak Ayu, telah mengirimkan mereka hadiah melalui fitur yang ada di *live streaming* aplikasi tersebut, katanya hadiah itu nanti dapat dikonversi menjadi rupiah. Melihat fenomena itu, aku jadi penasaran, apakah ada tanggung jawab politik di sana?

Singkat cerita, aku sudah duduk berhadapan dengan sang dosen untuk membicarakan terkait politik lokal. Ternyata, politik Minang cukup unik, sebelum negara kita mencetuskan diri sebagai negara demokrasi, orang-orang Minangkabau telah lama menerapkan sistem ini dalam

lingkup kehidupan mereka. Mengingat ruang hidup mereka yang komunal, sebelum menetapkan suatu putusan, biasanya orang Minangkabau akan menggelar pertemuan seperti kerapatan adat untuk berdiskusi bersama. Diskusi ini akan dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai Datuak. Datuak memiliki peran penting dalam masyarakat Minangkabau, karena segala perkara akan diputuskan oleh Datuak.

Lewat cerita sang dosen, kini aku mengetahui bahwa peran krusial sang Datuak akhir-akhir ini sering dimanfaatkan sebagai tameng politik lokal. Entah bentuknya dengan meminta dukungan atau sang Datuak sendiri yang terjun ke dunia politik. Fenomena ini dapat dilihat saat pemilu 2025 yang lalu. Ada banyak sekali poster dan baliho yang menampilkan calon legislatif dengan tulisan Datuak sebagai embel-embel kampanye mereka. Sang dosen berkata bahwa hal ini jelas seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, kampanye dengan menggunakan dukungan sang Datuak akan sangat berdampak pada pemerolehan suara karena keterlibatan Datuak di ranah politik bisa membawa representasi suara anak kemenakan ke parlemen. Tetapi disisi lain, keberadaan Datuak dalam politik sangat mengkhawatirkan, gelar kehormatan Datuak yang sakral akan semakin kehilangan makna ketika dipolitisasi.

Aku masih ingat betul cerita dosenku, bahwa di beberapa kasus sudah ada yang mengalami gesekan. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, dukungan kepada calon adalah wajar, apalagi jika calon itu adalah darah keturunan sendiri. Seorang Datuak, dalam lingkungan adatnya memang memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mendukung anak kemenakan, apalagi jika itu dianggap membawa nama baik suku. Tapi, bayangkan apabila lawan politiknya masih berada di dalam keluarga adatnya sendiri. Skenario yang terjadi adalah akan adanya gesekan internal adat. Posisi Datuak yang berfungsi sebagai pemersatu, kini rawan menjadi sumber perpecahan.

Ini kasusnya masih dalam kondisi Datuak sebagai pendukung, bagaimana dengan kasus Datuak yang langsung menceburkan diri ke dalam politik praktis? Masalahnya akan semakin runyam. Sang dosen terus bercerita, Ia mengatakan, “bukannya tidak boleh (Datuak ikut kontesasi politik), tapi takutnya akan ada pengkotak-kotakkan di dalam masyarakat adat.” Beliau menganalogikan bagaimana jika ada masalah di antara anak-kemenakan, lalu keduanya berkonsultasi melalui Datuak. Namun ternyata, si A tidak mendukung Datuaknya dalam kontesasi politik, berbeda dengan si B yang merupakan tim sukses sang Datuak, dikhawatirkan akan terjadi

politik kepentingan yang membuat putusan menjadi bias. Pada akhirnya, posisi Datuak dalam dunia politik hanya menciptakan muara untuk politik identitas.

Setelah mendengar penjelasan sang dosen, aku lantas teringat dengan sekumpulan ojek *online* yang sedang *live streaming* di seberang gedung tadi. Apakah di sana ada tanggung jawab politik yang menyebabkan daerah ini masih terkesan jalan di tempat, terutama di sektor ekonomi, mengingat Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang pergerakan investasinya tergolong lesu. Padahal, Sumatera Barat memiliki sejuta potensi ekonomi, terutama pariwisata mereka yang banyak dikunjungi oleh turis mancanegara. Jika kita lihat secara objektif, Sumatera Barat tidak kekurangan figur cemerlang dan telah mencetak banyak sekali politisi nasional. Lalu, mengapa bisa kualitas individunya tidak berbanding lurus dengan kemajuan daerah Sumatera Barat?

Pertanyaanku ini mungkin terkesan cukup menyentil, tetapi hal itu betul-betul membuatku risau dan penasaran. Bagaimana tidak, provinsi yang seharusnya kaya justru keadaannya membuatku mengelus dada. Bukan hanya soal potensi pariwisata yang terbengkalai—tapi juga kenyataan bahwa standar hidup masyarakat Sumatera Barat tergolong rendah. Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat, melalui data yang disajikan oleh tim Kompas.com, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.16 Tahun 2024 tentang kenaikan UMP tahun 2025, hanya sebesar Rp2.994.193. Angka ini menjelaskan betapa kontrasnya antara potensi yang dimiliki dengan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Tanpa ada niat menjatuhkan sedikit pun, harga bahan pokok di Sumatera Barat, khususnya kota Padang tergolong cukup mahal untuk daerah yang upah minimumnya rendah. Aku berani mengatakannya karena ini adalah pengalaman pribadi yang kurasakan saat berbelanja mingguan di Pasar Raya.

Menurut penuturan sang dosen, Ia berkata bahwa memang benar Sumatera Barat melahirkan banyak politisi nasional, tetapi kondisi mereka saat ini sudah jauh berbeda dengan politisi-politisi Minang terdahulu. Ada kesenjangan antara kepentingan politik daerah asal mereka dengan kepentingan politik nasional. Perbedaan haluan ini lah yang kemudian menyebabkan pertumbuhan di daerah ini sedikit terhambat. Tak hanya demikian, beliau juga berkata bahwa politisi Minang yang ada di bangku parlemen pusat saat ini kurang vokal dalam menyuarakan kepentingan masyarakat yang ada di daerahnya, karena terlalu terpaku pada kepentingan partai politik masing-masing. Hal ini ditabrakkan oleh kenyataan bahwa kondisi politik daerah yang didominasi oleh sekelompok orang yang lebih fokus menjaga jaringan sosial mereka ketimbang

menjalankan fungsi kepentingan publik. Akibatnya, roda pembangunan daerah nyaris tidak bergerak maju dan lebih sering berputar di tempat.

Tak terasa, satu jam telah berlalu sejak kami memulai perbincangan. Berdiskusi dengan sang dosen membuatku mengetahui banyak hal soal dinamika politik lokal Sumatera Barat. Setelah merasa cukup, aku akhirnya memutuskan untuk pamit, karena setelahnya aku juga ada jadwal kelas mata kuliah teori komunikasi. Tanpa berlama-lama, aku ucapkan terimakasih karena telah bersedia aku repotkan untuk menjadi narasumber. Kubuka ponselku untuk memesan layanan ojek *online*, dan aku teringat dengan sekumpulan ojek *online* yang tengah *live streaming* tadi. Sekarang mereka sudah tidak berteriak dan berjoget lagi, masing-masing sudah sibuk dengan gawai masing-masing untuk menjemput orderan. Sepanjang perjalanan menuju kampus, ojek yang kutumpangi terus menerus menceritakan sejarah hidupnya. Aku sampai hafal betul bagaimana perjalanan karirnya yang bermula dari pabrik kertas, kemudian menjadi staff *wedding organizer*, kemudian memutuskan menjadi ojek online. Aku biarkan dia terus bercerita, tapi tidak bisa bohong isi kepalaku hanya terpikir “teori apa yang akan dipelajari di kelas nanti?”, “tadi rekaman wawancara aman tidak, ya?”, “ aduh bentar lagi turun hujan.” Aku terus merintih dalam hati agar ojekku menaikkan kecepatan motornya, sebab aku tak tega untuk menginterupsi omongannya.

Sekitar dua minggu setelah wawancara, kini aku berkutat dengan laptopku membaca artikel demi artikel demi memperkaya pengetahuanku mengenai politik Minangkabau. Ternyata, dinamika politik yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, terutama tokoh adat menimbulkan banyaknya fenomena yang semakin menarik untuk dibahas. Tak hanya kesenjangan secara fisik, namun dari segi kultural sekalipun terdapat kesenjangan yang keberadaannya sering kali tak terlihat, yakni kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Minang. Di balik sistemnya yang menganut asas matrilinealitas, ternyata peran laki-laki dalam adat Minangkabau jauh lebih aktif daripada kaum perempuan.

Ceritanya, dahulu perempuan Minangkabau menempati posisi yang tinggi di dalam rumah gadang. Posisi perempuan bisa dibilang *all role*—segala sesuatu berada di tangan perempuan. Mulai dari segi waris, anak perempuan mewarisi semua harta dan pusaka milik keluarga, sedangkan anak laki-laki hanya berperan sebagai penjaga, apabila terjadi sesuatu di masa mendatang. Sebelum memutuskan suatu perkara, pihak perempuan juga lah yang memiliki kuasa untuk menentukan apakah keputusan layak untuk dilakukan atau tidak, disini kita menyebutnya

sebagai Bundo Kanduang—perempuan yang dituakan dan dihormati dalam rumah gadang. Tak hanya itu, dari segi keturunan pun akan mengikuti garis ibu. Jadi, apabila ada anak yang terlahir dari ayah Minang dan ibu dari suku lain, maka anaknya tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Minang, sebab darah Minang tidak diturunkan oleh ayah atau pihak laki-laki. Contohnya, seperti kisah si Zainuddin dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, bagaimana hidupnya tampak kerbau yang terlepas dari tali kekangnya karena dianggap tak beradat dan tak punya tempat berpulang sebab tidak mewarisi darah Minang.

Biar kata perempuan Minang yang mewarisi segalanya—harta, pusaka, maupun keturunan—faktanya ruang gerak perempuan masih terbilang sempit. Di balik sistem matrilineal yang diagungkan, peran perempuan di ranah publik masih sangat minim, terlihat dari sedikitnya representasi perempuan dalam politik lokal. Peran perempuan kebanyakan hanya berputar pada dapur, sumur, dan kasur. Sementara laki-laki mengisi panggung pengambilan keputusan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian, mengapa dualitas seperti ini dapat terjadi? Minangkabau yang sistemnya matrilineal lebih terkesan seperti penganut sistem patriarkal. Sistem matrilineal yang dianut dan dibanggakan, seringkali hanya berhenti di tataran simbolik, bukan praktis. Masyarakat menyebut perempuan sebagai *limbago adat*, sebagai Bundo Kanduang yang dihormati, akan tetapi pada kenyataannya, suara perempuan jarang terdengar dalam ruang-ruang strategis pengambilan keputusan, baik di lembaga adat maupun dalam politik formal.

Setelah menelusuri beberapa jurnal, aku menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Fakta ini juga lah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa jarang sekali ditemui perempuan yang mengisi bangku kepemimpinan. Jika aku katakan bahwa aturan adat yang telah membatasi ruang gerak perempuan Minangkabau, aku yakin seseorang akan datang menghampiriku dengan membawa sebuah balok kayu dan memintaku untuk merevisi tulisan ini, karena kenyataannya memang tidak sesimpel itu. Seperti yang sudah berulang kali aku sampaikan, bahwa orang Minangkabau memegang erat sistem matrilineal. Meski begitu, matrilineal bukanlah konsep yang sama dengan feminisme. Memang benar bahwa seluruh harta, pusaka, dan keturunan diwarisi oleh perempuan, tetapi kekuasaan politik dan pengambilan keputusan? Ruang publik sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki. Aku akan menceritakan lebih lengkapnya nanti setelah memberitahu semua alasan mengapa perempuan jarang ada yang memutuskan karir di dunia politik.

Alasan selanjutnya adalah karena adanya tabu. Dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau, perempuan diajarkan untuk memiliki rasa malu, sopan santun, dan pandai menjaga diri. Hal ini juga tercantum dalam *sumbang duo baleh*, contohnya seperti *sumbang* lidah, yang mengajarkan agar mampu menjaga lisan. Permasalahannya, dunia politik identik dengan perdebatan yang penuh dengan konflik, tidak jarang pula kita harus melantangkan suara dan saling bersitegang agar dapat didengar. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran yang ada dan dianggap tabu atau melanggar kodrat. Itulah mengapa panggung politik didominasi oleh kaum laki-laki. Tak hanya itu, apabila perempuan Minangkabau ingin berpartisipasi dalam kontesasi politik, maka sudah dipastikan Ia akan menanggung beban ganda di pundaknya. Bagaimana maksudnya? Kembali lagi ke ceritaku yang sebelumnya, bahwa perempuan Minang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya di rumah. Apabila Ia terjun ke dunia politik, maka Ia harus mengurus rumah dan politik sekaligus. Bayangkan lagi jika Ia sebenarnya adalah Bundo Kanduang, maka peran adat dan politik harus dapat Ia penuhi dalam satu waktu. Hal ini terdengar sangat berat bukan? Kalau diibaratkan *superhero*, perempuan Minang sudah seperti sosok ElastiGirl dalam film *The Incredibles*.

Jadi sebenarnya adat memang tidak melarang perempuan untuk bergerak dalam ruang publik, tetapi adanya aturan-aturan itu entah kenapa terkadang terasa seperti memberikan selimut halus yang membatasi gerak perempuan, terutama dalam bidang politik dan kepemimpinan. Ibarat kata kamu ingin makan permen, tapi gigi kamu sedang berlubang. Bukannya tidak boleh, tapi jika kamu tetap nekat makan permen, maka kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya.

Batasan ini datang dari budaya yang diam-diam sudah tertanam begitu dalam di masyarakat. Di banyak kasus, perempuan justru harus bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan kapasitasnya, sembari tetap menjaga “nilai-nilai perempuan Minang” yang seringkali diartikan secara sempit, seperti harus sopan, tidak terlalu vokal, dan tidak boleh “menantang” laki-laki. Jadi, meski secara tekstual adat bersifat egaliter, dalam praktiknya, tafsir terhadap adat seringkali menempatkan perempuan dalam posisi serba salah. Ingin bergerak, tapi tak bisa terlalu jauh. Ingin bersuara, tapi takut dianggap “tidak sesuai kodrat”.

Lalu bagaimana awal mula kisah laki-laki menguasai lingkup politik? Bukankah laki-laki hanya menjadi perpanjangan tangan dari perempuan? Cerita ini berawal dari masuknya agama Islam ke dalam masyarakat Minangkabau. Itulah alasan mengapa aku sempat mengatakan bahwa

Minangkabau itu unik, karena sistem mereka yang matrilineal, sedangkan Islam yang cenderung patriarkal. Semenjak masuknya ajaran Islam ke dalam masyarakat Minangkabau, ajaran adat kemudian disesuaikan dengan mengadopsi ajaran dan nilai-nilai Islam. Seperti kata pepatah “Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Kalimat ini kemudian dijadikan sebagai landasan dalam setiap lingkup kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Salah satunya dalam hal politik, seperti diadakannya musyawarah bersama untuk memutuskan sebuah putusan. Dari sinilah laki-laki kemudian menjadi perpanjangan tangan perempuan dalam menetapkan keputusan. Jadi, keputusan tetap di setuju oleh perempuan, tetapi soal pelaksanaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh laki-laki.

Meski begitu, posisi perempuan saat itu tetap saja terbilang masih sangat dominan, jika dibandingkan laki-laki yang hanya berperan sebagai pelengkap saja. Oleh karena itulah, menurut penjelasan dalam salah satu tulisan yang berjudul “Buru Babi: Politik Identitas Laki-laki Minangkabau,” kaum laki-laki saat itu kemudian mulai melakukan *buru babi* sebagai ajang untuk menunjukkan ekspresi identitas mereka. Jadi, awalnya *buru babi* memang berangkat dari sebuah masalah praktis, namun kemudian tradisi ini secara perlahan membentuk ruang untuk pamer kejantanan. Unik bukan? Kegiatan yang awalnya terlihat biasa saja, ternyata memiliki sejarah panjang terkait bagaimana maskulinitas dikonstruksi, diperlihatkan, hingga diwariskan sebagai bagian dari identitas sosial laki-laki Minangkabau.

Dari adanya kegiatan *buru babi* yang bertransformasi sebagai ruang unjuk kejantanan bagi laki-laki Minangkabau, muncul sebuah pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya bagaimana peran dan posisi laki-laki Minangkabau dalam masyarakat Minang. Adanya maksud tersirat dari kegiatan *buru babi* tersebut, secara tidak langsung memberitahukan bahwa adanya sebuah kepentingan yang mungkin saja tidak terpenuhi pada saat itu. Setelah menyelami beberapa sumber literatur, ada sebuah jurnal yang menceritakan bagaimana sebenarnya kondisi dan posisi laki-laki Minangkabau pada saat itu, tak hanya itu, jurnal ini juga bercerita soal politik identitas yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan janda saat itu. Judul artikelnya adalah Palang Pintu: Politik Identitas Laki-laki Minangkabau Sebagai Sebuah Respon Terhadap Stigma Janda.

Keberadaan laki-laki di Minangkabau dapat diibaratkan sebagai *abu di ateh tunggua* (abu di atas tunggul kayu). Artinya, laki-laki saat itu benar-benar rapuh di dalam adat Minangkabau, seperti abu yang dapat diterbangkan angin kapan saja. Keberadaan laki-laki jika dihadapkan

dengan kekuasaan perempuan hampir terbilang tidak ada apa-apanya. Itulah mengapa anak laki-laki zaman dahulu dibesarkan dan belajar di surau, sebab mereka tak memiliki ruang di rumah gadang. Ketika laki-laki ini kemudian menikah, lalu menetap di kediaman istrinya, maka ia dianggap sebagai *urang semando* atau orang luar. Sebagai orang luar, laki-laki harus bersikap baik kepada keluarga perempuan karena keberadaan laki-laki di keluarga istrinya tergantung pada “kemurahan hati” keluarga istri untuk tetap mempertahankan dirinya sebagai *urang semando*. Itulah mengapa kegiatan *buru babi* tadi dilakukan, salah satunya untuk menciptakan kesan bahwa mereka “ada” di dalam masyarakat.

Faktanya, meskipun *buru babi* telah dilakukan, keberadaan sang laki-laki tidak serta merta menjadi “ada.” Apalagi di zaman dahulu, laki-laki hanya dianggap sebagai “tampang” atau benih untuk melahirkan keturunan. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak dimiliki oleh sosok Mamak atau paman dari anak-anaknya tersebut. Kemudian seluruh harta dan pusaka semuanya dimiliki oleh sang istri, hal ini tidak dapat menyangkal fakta bahwa ini merupakan salah satu faktor mengapa angka perceraian sangat tinggi pada saat itu. Mengingat posisinya yang sungguh rapuh dalam masyarakat, begitu mereka bercerai dari istrinya, mereka merasa bahwa masyarakat akan semakin mengucilkan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya politik identitas gender di dalam masyarakat Minangkabau, yang dikenal sebagai *palang pintu*.

Laki-laki pada saat itu mengibaratkan diri mereka sebagai palang pintu, yakni tanda penghalang agar pintu tidak dapat dimasuki oleh orang lain. Menurut mereka, mau sekokoh apapun pintu, apabila tidak terdapat larangan masuk, orang-orang akan tetap berusaha masuk ke dalamnya. Berbeda dengan pintu yang telah diberikan tanda larangan, mau sereot apapun pintunya, orang lain tidak akan ada yang berani memasukinya. Kurang lebih begitu analogi yang digunakan laki-laki Minangkabau pada saat itu. Jadi, mereka mengatakan bahwa mereka adalah palang dari sang pintu (istrinya). Dengan kata lain, kaum laki-laki merasa bahwa dirinya adalah palang untuk istrinya agar merasa aman.

Pertanyaannya, aman dari apa? Dan dari siapa? Iya, dari kaum laki-laki itu sendiri. Perlu diingat kalau politik *palang pintu* ada untuk melindungi diri mereka dari cibiran masyarakat karena telah menduda. Sehingga, kaum laki-laki menyebarkan propaganda melalui kegiatan *malapau* dan *maota* untuk menciptakan kesan bahwa perempuan yang telah menjanda itu telah merugi karena

membuang mereka dari hidupnya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, ini disebut sebagai *playing victim* dan juga *gaslighting*, ya. Usut punya usut, ini bisa terjadi karena kaum laki-laki yang tidak tahan dijadikan alat perpanjangan tangan oleh kaum perempuan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Pada akhirnya, ada banyak laki-laki yang berujung diusir oleh mantan istrinya, bahkan di beberapa kasus pihak perempuan lah yang meminta cerai terlebih dahulu.

Kenapa politik identitas palang pintu ini dapat masuk ke dalam lapisan masyarakat Minangkabau? Jawabannya karena adat Minang memiliki dualitas dalam menjalankan fungsinya. Laki-laki memang tidak memiliki kuasa seperti halnya kaum perempuan, tetapi mereka dijadikan sebagai semacam pelaksana tugas. Contohnya saat pernikahan akan digelar, yang memiliki tugas untuk melamar adalah kaum laki-laki. Melihat posisinya yang terkadang bisa saja sangat penting ini, disinilah *palang pintu* masuk. Gunanya adalah untuk membuat perempuan yang menjanda menyesal, dan membuat perempuan yang ada di dalam pernikahan takut untuk bercerai dari sang suami, sehingga harus menahan meski keinginan bercerai sangat besar.

Seorang perempuan janda mengalami perbedaan yang cukup signifikan dalam hidupnya, sesaat setelah mereka bercerai. Hal ini dikarenakan perempuan yang menjanda akan dijadikan bahan pergunjungan atau *ota*. Perempuan yang menjanda dianggap sebagai beban bagi masyarakat, entah dia janda karena cerai hidup maupun cerai mati. Terlalu banyak konsekuensi yang dihadapi oleh perempuan yang menjanda. Mereka dianggap tidak mampu mengurus suaminya dengan becus, dianggap sebagai perempuan yang tidak tau cara bersyukur karena telah membuang *palangnya*, bahkan terkadang menjurus ke arah pelecehan seksual, seperti anggapan bahwa janda adalah perempuan yang *kancang ka laki-laki*. Masyarakat menganggap, perempuan yang tidak memiliki palang pintu sudah sewajarnya didekati oleh orang lain. Seandainya mereka tidak bercerai, maka kehormatan mereka akan bisa dijaga oleh sang *palang*.

Bahkan, jika sang Bundo Kanduang yang mengalami perceraian, kecaman sosial tidak akan berhenti hanya di titik itu, terkadang pihak keluarga akan terus mendesak agar Ia segera menikah lagi untuk menepis cibiran dari masyarakat. Malang sungguh nasib perempuan kadang, berpisah dengan harapan dapat sejahtera, justru semakin menderita karena celaan masyarakat. Menjadi janda memang bukan berarti menghilangkan fungsinya sebagai Bundo Kanduang, hanya saja fungsi itu dianggap tidak akan berjalan dengan sempurna. Stigma ini diciptakan oleh laki-laki untuk memperteguh keberadaan mereka agar perempuan merasa bahwa mereka membutuhkan

laki-laki. Ironisnya, palang pintu itu adalah gerakan yang dibuat saat sudah menjadi duda. Jadi palang pintu ada bukan untuk melindungi anak dan istrinya, melainkan melindungi diri mereka dari cibiran masyarakat dengan menyebarkan propaganda terkait mantan istri mereka.

Berbicara soal politik Identitas di dalam ranah adat, aku teringat dengan film berlatar Minangkabau yang berjudul *Onde Mande!* Selain membahas soal bagaimana upaya mereka mengelabui pegawai pabrik sabun demi dapat mengklaim hadiah undian agar dapat dipergunakan untuk pemberdayaan desa, film ini juga menyentil soal kehidupan di rantau *urang*. Lewat artikel berbahasa Melayu yang membahas soal kehidupan orang Minang di negeri jiran, dikatakan bahwa orang Minang sedari dulu lebih memilih untuk membuka usaha pribadi meskipun kecil-kecilan, daripada harus bekerja dibawah perintah orang, seperti menjadi pegawai negeri atau karyawan. Alasannya sederhana, bahwa orang Minang memiliki anggapan bahwa bekerja di bawah perintah orang tidak memiliki kesan “wah”, karena ujian atau kesulitannya dianggap biasa saja, menyebabkan diri menjadi sulit untuk berkembang. Berbeda dengan mereka yang *manggaleh*, pekerjaannya dianggap lebih mulia karena dapat melatih diri untuk berkembang dan mandiri. Adanya pernyataan tersebut, maka tidak heran jika rata-rata toko baju, tekstil, rumah makan, dan sebagainya kebanyakan adalah milik orang atau keturunan Minangkabau.

Terdapat sebuah pantun yang cukup melegenda, yang bunyinya:

“Karatau madang di hulu-

Babuah babungo balun-

Marantau bujang dahulu-

Di rumah paguno balun”.

Pantun ini mengandung makna bahwa pemuda dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh atau merantau untuk mencari pengalaman di luar kampung halaman sebelum akhirnya pulang ke kampung halaman dengan membawa keberhasilan. Pepatah lain juga mengatakan “satinggi-tinggi tabang bangau, nan pulang kakubangan juo.” Artinya, mereka yang telah merantau diharapkan pulang kembali ke kampung halamannya. Betapapun jauh seorang perantau melanglang buana, identitasnya sebagai orang Minang akan tetap melekat, dan kampung halaman akan selalu menjadi ruang pulang, baik secara fisik maupun emosional. Harapan untuk kembali

tidak hanya menyiratkan rindu pada tanah kelahiran, tetapi juga dengan harapan membawa perubahan, membangun daerah, dan memberi kontribusi nyata bagi daerah tempat Ia dibesarkan.

Berdasarkan salah satu jurnal yang membahas soal pola migrasi perempuan Minangkabau, terdapat setidaknya lima pola perpindahan perempuan Minang. Hasil penelitian itu menyatakan bahwa mayoritas dari mereka masih sering menyempatkan waktu untuk pulang ke kampung halamannya. Sedangkan sebagiannya mengatakan hanya pulang sekali-kali saat lebaran atau ketika ada musibah saja, dan bagian sedikitnya ada yang berkata belum pernah pulang sama sekali, bahkan tidak akan pulang kembali ke kampung halaman mereka. Ada berbagai macam faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah tidak ada lagi anggota keluarga yang dapat dijenguk di kampung halamannya.

Keberadaan orang Minang yang ada di rantau tergolong cukup banyak. Bahkan, diperkirakan jumlah perantau jauh lebih banyak disbanding dengan jumlah penduduk provinsi Sumatera Barat. Ketika membaca pernyataan itu, matak sedikit terbelalak, bagaimana bisa jumlah penduduk Sumatera Barat yang segini banyaknya kalah jumlah dengan diaspora Minang. Bayangkan saja 5,5 juta penduduk Sumatera Barat dan seluruh jumlah diaspora Minang mencoblos satu calon yang sama, maka sudah dipastikan sang calon itu akan menang telak.

Ternyata kajian mengenai soal politik diaspora sudah pernah dibahas, salah satu jurnal berbahasa Inggris yang berjudul “Modalities of Minangkabau Migrant Legislative Candidates in the 2019 Legislative Election” berbicara soal pemerolehan suara yang didapatkan oleh Fadli Zon dan Jon Erizal pada kontesasi politik 2019. Artikel ini mengatakan bahwa jaringan perantau Minangkabau telah menjadi kekuatan sosial-politik yang solid, dimanfaatkan secara efektif oleh tokoh-tokoh seperti Fadli Zon dan Jon Erizal. Tradisi merantau yang telah melekat dalam budaya Minangkabau, ditambah sistem kekerabatan matrilineal yang menumbuhkan rasa solidaritas tinggi, mendorong terbentuknya koneksi emosional dan keterlibatan aktif antar perantau dalam mendukung figur-figur politik dari kampung halaman. Tak hanya itu, dukungan dari struktur adat 'Tigo Tungku Sajarangan'—yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai—juga memiliki peran penting dalam mengarahkan komunitas adat untuk memenangkan calon asal ranah Minang. Kombinasi kekuatan diaspora dan otoritas adat ini menjadi motor kemenangan beberapa calon legislatif asal Minangkabau dalam Pemilu 2019.

Dapat disimpulkan bahwa politik Minangkabau adalah ruang yang kompleks, di mana tradisi, identitas, dan ketimpangan sosial saling berkelindan. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik dan pembeda dari politik lokal yang ada di daerah lain. Di balik kebanggaan akan sistem matrilineal dan tradisi merantau, terdapat cerita yang membuat kita mengelus dada. Kesenjangan pembangunan yang terus berulang, stigma terhadap perempuan—terutama janda—serta dominasi kaum laki-laki dan elit adat, menunjukkan bahwa politik identitas di ranah Minang tak hanya berlangsung di panggung formal, tapi juga di level sosial dan kultural.

Figur laki-laki kerap kali menjadi pusat otoritas, entah itu sebagai kepala kaum, Datuak, maupun pemegang jabatan formal, sementara perempuan masih harus berhadapan dengan stereotip dan batasan kultural yang terkadang terasa menyesak. Pada saat yang sama, diaspora Minang—yang jumlahnya bahkan melebihi penduduk kampung halaman—menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. Mereka menggenggam potensi suara, jaringan, dan dukungan yang mampu mengangkat tokoh-tokoh lokal ke level nasional, namun juga mencerminkan bahwa harapan terhadap kemajuan sering kali datang dari luar, bukan dari dalam daerah itu sendiri.

Dengan memahami semua ini, politik Minang tidak bisa hanya dibaca lewat adat atau kebanggaan kultural semata. Ia perlu dibaca secara kritis—melihat siapa yang diberi ruang, siapa yang terpinggirkan, dan bagaimana kekuasaan diwariskan, diperebutkan, dan dipertanyakan. Jika Minangkabau ingin tetap relevan dalam lanskap politik nasional, maka reformulasi terhadap relasi kekuasaan, keterbukaan terhadap perubahan sosial, dan keberanian mengkritisi tradisi menjadi kunci untuk masa depan yang lebih setara dan inklusif.